

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DESA MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANGDES) DI DESA SUKAMULYA, KECAMATAN NATAR
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

(Tugas Ujian Tengah Semester)

Oleh

RATU AMARA

NPM 2416041122



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

202;5

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	5
2.2 Landasan Teori.....	6
2.2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat.....	6
2.2.2 Konsep Pembangunan Desa.....	6
2.2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes).....	7
2.3 Kerangka Berpikir.....	7
2.4 Grand Theory: Teori Partisipasi dan Teori Pembangunan.....	8
2.5 Middle Range Theory: Teori Pembangunan Partisipatif dan Teori Good Governance.....	9
2.6 Applied Theory: Penerapan dalam Konteks Musrenbangdes di Desa Sukamulya.....	9
2.7 Kerangka Pikir.....	10
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Tipe Penelitian.....	13
3.2 Fokus Penelitian.....	14
3.3 Lokasi Penelitian.....	14
3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	15
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	15
3.6 Teknik Analisis Data.....	16
3.7 Teknik Keabsahan Data.....	16
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas hidup dan kemandirian desa. Desa memiliki peran strategis karena menjadi unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan desa sangat ditentukan oleh sejauh mana masyarakat berperan aktif dalam setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.

Dalam konteks pembangunan partisipatif, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) menjadi wadah utama bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, ide, dan kebutuhan mereka terkait prioritas pembangunan desa. Musrenbangdes dilaksanakan setiap tahun sebagai forum perencanaan partisipatif yang melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, serta kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa arah pembangunan desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal.

Kebijakan tentang perencanaan pembangunan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Regulasi tersebut menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan sebagai bentuk penerapan prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas di tingkat desa. Dengan adanya Musrenbangdes, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang aktif dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayahnya sendiri.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan Musrenbangdes seringkali masih menghadapi berbagai tantangan. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal, baik dari segi jumlah kehadiran, kualitas usulan, maupun keterlibatan kelompok masyarakat yang beragam. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya

partisipasi masyarakat antara lain kurangnya sosialisasi, dominasi aparat desa dalam proses pengambilan keputusan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme perencanaan pembangunan desa. Akibatnya, hasil Musrenbangdes terkadang belum sepenuhnya merefleksikan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kondisi tersebut juga terlihat di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sebagai salah satu desa yang sedang berkembang, Desa Sukamulya memiliki potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang cukup besar untuk mendorong kemajuan pembangunan. Namun, tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes masih perlu ditingkatkan. Banyak warga yang belum aktif menyampaikan pendapat atau bahkan belum mengetahui secara jelas mekanisme pelaksanaan Musrenbangdes. Hal ini berpotensi menyebabkan perencanaan pembangunan desa menjadi kurang efektif dan tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam Musrenbangdes, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka peneliti dapat merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu adalah; Bagaimana partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk: Mendeskripsikan bentuk partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Musrenbangdes.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis: Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu Administrasi Negara, khususnya dalam bidang kebijakan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Manfaat Praktis: Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa Sukamulya dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan Musrenbangdes agar lebih inklusif dan partisipatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memberikan gambaran mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan menjadi dasar dalam merumuskan fokus penelitian ini.

1. Andryanto (2021) dalam penelitiannya berjudul *Women's Participation in Village Development Planning: Case of Indonesia* menemukan bahwa partisipasi masyarakat, khususnya perempuan, dalam forum Musrenbangdes masih bersifat formalitas. Kehadiran masyarakat seringkali tidak diiringi dengan kontribusi aktif dalam penyusunan prioritas program pembangunan desa.
2. Jannah dan Rodiyah (2021) melalui penelitian berjudul Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Pangreh, Kabupaten Sidoarjo menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, keterbukaan pemerintah desa, serta efektivitas komunikasi antara perangkat desa dan warga.
3. Hardayani dan Yogopriyatno (2025) dalam penelitian berjudul *Enhancing Community Participation in Village Planning: Cahaya Negeri Case Study* menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan sosialisasi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.
4. Hendri (2010) dalam skripsinya di Universitas Lampung berjudul *Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang di Kecamatan Kotabumi Selatan* menjelaskan bahwa meskipun kehadiran masyarakat cukup tinggi, partisipasi substantif masih rendah karena dominasi elit dan keterbatasan pemahaman warga terhadap proses Musrenbang.
5. Nazla Rafilah Wudianto dan Tomi Setiawan (2023) dalam penelitiannya *Perencanaan Pembangunan Partisipatif di Desa Mekarsari, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut* menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat

meningkat apabila forum Musrenbangdes dijalankan secara terbuka dan hasilnya benar-benar dijadikan dasar penyusunan RKPDDes.

Dari berbagai penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa merupakan faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, pelaksanaan partisipasi masyarakat seringkali belum optimal karena dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan pemerintahan desa.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Konsep Partisipasi Masyarakat

Menurut Cohen dan Uphoff (1980), partisipasi masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan mulai dari pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program. Partisipasi yang baik tidak hanya berarti kehadiran fisik, tetapi juga melibatkan masyarakat dalam memberikan ide, masukan, dan pengawasan terhadap jalannya program pembangunan.

Conyers (1982) menjelaskan tiga alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yaitu:

1. Partisipasi merupakan hak dasar masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
2. Partisipasi meningkatkan efektivitas pembangunan karena keputusan diambil berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat.
3. Partisipasi menciptakan rasa memiliki (sense of ownership) terhadap hasil pembangunan.

Sementara itu, Mubyarto (2000) berpendapat bahwa pembangunan yang berhasil adalah pembangunan yang melibatkan masyarakat secara aktif sebagai pelaku utama. Pembangunan yang dilakukan tanpa partisipasi masyarakat cenderung tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kebutuhan lokal.

2.2.2 Konsep Pembangunan Desa

Menurut Todaro dan Smith (2011), pembangunan desa merupakan proses multidimensional yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembangunan desa diarahkan untuk memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Keban (2019) menegaskan bahwa pembangunan desa harus dilaksanakan dengan prinsip partisipatif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima hasil pembangunan.

Secara hukum, pembangunan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan kepada desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

2.2.3 Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

Musrenbangdes merupakan forum tahunan yang melibatkan masyarakat dan pemerintah desa dalam menyusun prioritas program pembangunan desa. Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Musrenbangdes bertujuan untuk menyepakati kegiatan prioritas yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Menurut Suharto (2018), Musrenbangdes menjadi wadah demokrasi lokal yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan desa. Proses Musrenbangdes yang ideal harus memperhatikan prinsip inklusivitas, keterbukaan, dan representasi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan.

Keberhasilan Musrenbangdes sangat ditentukan oleh beberapa faktor (Widjaja, 2015):

1. Keterbukaan informasi publik dan komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat.
2. Kapasitas warga untuk memahami proses perencanaan.
3. Komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti hasil musyawarah.

Apabila faktor-faktor tersebut berjalan baik, maka partisipasi masyarakat akan meningkat dan hasil pembangunan menjadi lebih sesuai dengan kebutuhan warga desa.

2.3 Kerangka Berpikir

Berdasarkan teori-teori dan penelitian terdahulu, kerangka berpikir penelitian ini didasarkan pada pandangan bahwa partisipasi masyarakat merupakan inti dari pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kualitas perencanaan pembangunan desa melalui forum Musrenbangdes.

Hubungan antarvariabel dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konteks: Pembangunan desa sebagai bagian dari implementasi kebijakan otonomi daerah.

Fokus: Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes.

Faktor yang memengaruhi: Tingkat pendidikan, komunikasi publik, dukungan pemerintah desa, serta budaya partisipatif masyarakat.

Dampak: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan yang lebih inklusif, transparan, dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2.4 Grand Theory: Teori Partisipasi dan Teori Pembangunan

Grand theory yang mendasari penelitian ini adalah Teori Partisipasi dan Teori Pembangunan.

1. Teori Partisipasi (Cohen & Uphoff, 1980)

Teori ini menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup empat dimensi utama, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan,
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan,
- 3) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil, dan
- 4) Partisipasi dalam evaluasi.

Cohen dan Uphoff menekankan bahwa partisipasi bukan hanya keterlibatan simbolik, melainkan proses aktif yang memungkinkan masyarakat menentukan arah pembangunan. Melalui teori ini, penelitian ini melihat Musrenbangdes sebagai media formal bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan berperan langsung dalam perencanaan pembangunan.

2. Teori Pembangunan (Todaro & Smith, 2011)

Teori ini menjelaskan pembangunan sebagai proses multidimensi yang mencakup perubahan sosial, ekonomi, dan kelembagaan menuju peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks desa, pembangunan harus bersifat inklusif dan partisipatif, dengan masyarakat sebagai pusat pengambilan keputusan.

Teori ini menjadi dasar pemahaman bahwa pembangunan desa tidak hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia melalui pelibatan aktif warga desa.

Kedua teori ini menjadi landasan filosofis penelitian untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat memengaruhi kualitas pembangunan desa secara keseluruhan.

2.5 Middle Range Theory: Teori Pembangunan Partisipatif dan Teori Good Governance

Teori menengah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Pembangunan Partisipatif dan Teori Good Governance, karena keduanya menjembatani hubungan antara konsep partisipasi masyarakat dengan praktik penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal.

1. Teori Pembangunan Partisipatif (Chambers, 1994)

Teori ini menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama (*people-centered development*). Chambers menjelaskan bahwa masyarakat memiliki kapasitas dan pengalaman yang harus diakui dalam proses pembangunan.

Dalam Musrenbangdes, teori ini diterapkan untuk melihat sejauh mana masyarakat dilibatkan bukan hanya sebagai penerima keputusan, tetapi juga sebagai perencana yang menentukan prioritas pembangunan desa.

2. Teori Good Governance (UNDP, 1997)

Good Governance menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Prinsip partisipasi dalam *good governance* relevan dengan konteks penelitian ini, karena Musrenbangdes merupakan wujud penerapan tata kelola pemerintahan desa yang baik.

Dengan demikian, teori ini membantu menjelaskan bagaimana partisipasi masyarakat menjadi indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan desa.

Kedua teori ini memperjelas keterkaitan antara nilai partisipasi dan efektivitas kebijakan pembangunan desa.

2.6 Applied Theory: Penerapan dalam Konteks Musrenbangdes di Desa Sukamulya

Applied theory digunakan untuk menghubungkan konsep teoritis dengan fenomena empiris yang terjadi di lapangan, dalam hal ini berdasarkan literatur dan dokumen yang sudah ada mengenai Musrenbangdes di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam konteks penelitian ini, teori diterapkan sebagai berikut:

1. Penerapan Teori Partisipasi (Cohen & Uphoff, 1980)
 - 1) Masyarakat Desa Sukamulya telah terlibat dalam Musrenbangdes, namun sebagian besar masih pada tingkat kehadiran, belum pada tahap pengambilan keputusan.
 - 2) Partisipasi aktif lebih banyak dilakukan oleh tokoh masyarakat dan perangkat desa.
 - 3) Dengan teori ini, penelitian menilai bagaimana tingkat partisipasi masyarakat mencerminkan empat dimensi partisipasi (keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan, evaluasi).
2. Penerapan Teori Pembangunan Partisipatif (Chambers, 1994)
 - 1) Dalam perencanaan pembangunan desa, masyarakat seharusnya berperan sebagai *partner* pemerintah desa.
 - 2) Namun, berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan dokumen Musrenbangdes, proses perencanaan di Desa Sukamulya masih didominasi oleh perangkat desa.
 - 3) Teori ini digunakan untuk mengidentifikasi sejauh mana prinsip *people-centered development* sudah diterapkan di tingkat desa.
3. Penerapan Teori Good Governance (UNDP, 1997)
 - 1) Musrenbangdes sebagai forum partisipatif merupakan cerminan tata kelola pemerintahan desa yang baik.
 - 2) Akan tetapi, dalam praktiknya masih terdapat kendala seperti kurangnya transparansi informasi dan keterwakilan kelompok marginal.
 - 3) Dengan teori ini, penelitian menilai apakah Musrenbangdes di Desa Sukamulya sudah sesuai prinsip *participatory governance*.

Dengan demikian, teori-teori tersebut diaplikasikan untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat berperan dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan desa di Desa Sukamulya.

2.7 Kerangka Pikir

Penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Musrenbangdes merupakan forum resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat dan

menetapkan prioritas program pembangunan yang akan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).

Keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes mencerminkan penerapan prinsip pembangunan partisipatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Dalam forum ini, masyarakat seharusnya berperan aktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, hingga evaluasi program pembangunan desa.

Namun, berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, tingkat partisipasi masyarakat di beberapa desa termasuk Desa Sukamulya masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Musrenbangdes, minimnya akses informasi, dominasi elit desa, rendahnya tingkat pendidikan, serta budaya partisipatif yang belum terbentuk secara kuat di lingkungan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes. Melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini akan menggali berbagai pandangan teoritis mengenai partisipasi masyarakat, pembangunan partisipatif, dan tata kelola pemerintahan desa (*good governance*) sebagai dasar analisis.

Untuk memahami fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan Teori Partisipasi dari Cohen dan Uphoff (1980) sebagai *grand theory* yang menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan dalam empat tahap pembangunan, yaitu pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi. Selanjutnya, digunakan Teori Pembangunan Partisipatif dari Chambers (1994) sebagai *middle range theory* yang menekankan pentingnya pelibatan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima kebijakan.

Selain itu, Teori Good Governance dari UNDP (1997) dijadikan *applied theory* karena partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang berorientasi pada transparansi, akuntabilitas, dan keadilan sosial.

Dengan menggunakan ketiga teori tersebut, penelitian ini berupaya menggambarkan bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam forum Musrenbangdes dapat mencerminkan efektivitas pelaksanaan kebijakan pembangunan desa.

Secara konseptual, kerangka berpikir penelitian ini menempatkan Musrenbangdes sebagai instrumen utama dalam proses pembangunan partisipatif. Partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor internal seperti pengetahuan, kesadaran, dan motivasi warga, serta faktor eksternal seperti dukungan pemerintah desa, keterbukaan informasi, dan kondisi sosial masyarakat.

Partisipasi yang baik akan mendorong perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika partisipasi masyarakat rendah, maka kebijakan pembangunan desa berpotensi tidak sesuai dengan kebutuhan warga, sehingga efektivitas dan akuntab

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yang difokuskan untuk memahami secara mendalam bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena sosial secara holistik dan kontekstual melalui kajian terhadap literatur, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Menurut Moleong (2019), penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara menyeluruh dalam bentuk deskripsi kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti tidak melakukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan menggunakan data sekunder dari berbagai sumber ilmiah seperti jurnal, buku, laporan pemerintah, serta dokumen kebijakan yang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam kategori library research (penelitian kepustakaan).

Melalui metode ini, peneliti dapat menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai informasi yang telah tersedia untuk menemukan pola dan makna mengenai tingkat serta bentuk partisipasi masyarakat dalam proses Musrenbangdes.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan untuk memahami secara mendalam bagaimana partisipasi masyarakat terwujud dalam forum Musrenbangdes, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya berdasarkan hasil penelitian dan dokumen yang telah ada. Fokus penelitian meliputi:

1. Bentuk Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbangdes, meliputi keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi program pembangunan desa.
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat, seperti tingkat pendidikan, peran pemerintah desa, akses informasi, serta dukungan sosial dan budaya.
3. Implikasi Partisipasi terhadap Kualitas Pembangunan Desa, dilihat dari sejauh mana partisipasi masyarakat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kebijakan pembangunan desa.

Fokus ini berfungsi membatasi ruang lingkup analisis agar penelitian tetap sistematis dan sesuai dengan tujuan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Sukamulya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa ini aktif melaksanakan Musrenbangdes setiap tahun, namun tingkat partisipasi masyarakat masih relatif rendah berdasarkan laporan pemerintah daerah.

Selain itu, Desa Sukamulya memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam, sehingga menarik untuk dikaji secara konseptual mengenai sejauh mana forum Musrenbangdes menjadi wadah partisipatif bagi seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun peneliti tidak melakukan penelitian lapangan langsung, seluruh analisis akan didasarkan pada data sekunder seperti laporan pemerintah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Musrenbangdes di wilayah Lampung Selatan.

3.4 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber utama, karena seluruh informasi diperoleh dari hasil penelitian terdahulu, publikasi ilmiah, dan dokumen resmi.

Jenis dan sumber data adalah sebagai berikut:

1. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui:

- a. Jurnal ilmiah yang membahas partisipasi masyarakat dan pembangunan desa;
- b. Buku dan literatur akademik mengenai teori partisipasi, pembangunan partisipatif, dan good governance;
- c. Dokumen resmi pemerintah, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dan laporan Musrenbangdes dari Kabupaten Lampung Selatan;
- d. Hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, atau jurnal) yang membahas partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa.

Data sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dengan memberikan gambaran faktual dan kontekstual terhadap pelaksanaan Musrenbangdes, sekaligus menjadi dasar interpretasi teoritis dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi (*documentation study*). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian.

Menurut Sugiyono (2023), dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui catatan, arsip, laporan, atau bahan tertulis lainnya yang dapat mendukung analisis.

Langkah-langkah yang dilakukan peneliti meliputi:

1. Mengidentifikasi literatur yang relevan dengan partisipasi masyarakat dan Musrenbangdes
2. Mengumpulkan data berupa teori, konsep, serta hasil penelitian terdahulu dari jurnal, buku, dan dokumen resmi
3. Melakukan seleksi terhadap data yang relevan sesuai fokus penelitian
4. Menyusun ringkasan isi literatur untuk dianalisis secara tematik

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yang terdiri atas tiga tahap utama:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)
Menyaring, memilih, dan menyederhanakan informasi dari berbagai literatur agar fokus pada data yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti bentuk partisipasi dan faktor yang mempengaruhinya.
2. Penyajian Data (*Data Display*)
Menyusun hasil analisis dalam bentuk narasi deskriptif yang menggambarkan hubungan antara teori, hasil penelitian terdahulu, dan konteks Musrenbangdes di Desa Sukamulya.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)
Melakukan interpretasi terhadap hasil analisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian, serta memverifikasi kesimpulan dengan membandingkan berbagai sumber literatur agar hasilnya valid dan konsisten.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk memastikan validitas hasil analisis, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Moleong (2019), triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan:

1. Membandingkan hasil temuan antarjurnal dan penelitian terdahulu;
2. Memeriksa kesesuaian antara dokumen pemerintah dan teori partisipasi
3. Menggunakan lebih dari satu sumber literatur untuk memperkuat keandalan hasil analisis.

Selain triangulasi, peneliti juga menjaga *dependability* dan *confirmability* data dengan mencatat seluruh proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andryanto, D. (2021). Women's participation in village development planning: Case of Indonesia. *Journal of Public Administration Studies, Universitas Brawijaya*.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development Journal*.
- Conyers, D. (1982). *An introduction to development planning in the third world*. Wiley.
- Hardayani, Y., & Yogopriyatno, J. (2025). Enhancing community participation in village planning: Cahaya Negeri case study. *Jurnal Administrasi dan Manajemen, Universitas Muhammadiyah Bengkulu*.
- Jannah, A., & Rodiyah, I. (2021). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Desa Pangreh, Kabupaten Sidoarjo. *IJCCD*.
- Keban, Y. T. (2019). *Enam dimensi strategis administrasi publik*. Gava Media.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mubyarto. (2000). *Membangun sistem ekonomi kerakyatan*. LP3ES.
- Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2018). *Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat*. Alfabeta.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Economic development*. Addison-Wesley.
- Widjaja, H. (2015). *Otonomi desa dan pemerintahan desa*. Rajawali Pers.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.